

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Ilmiah:

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan. 1978. *Peranan Peraturan perundang-undangan dalam pembinaan hukum nasional*. Bandung. Armico.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka.
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta. Ruas Media.
- Eko Sugiarto. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Suaka Media.
- Eny Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta. UNY Press.
- H.Badruzaman Ismail, dkk. 2012. *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*. Provinsi Aceh. Majelis Adat Aceh.
- Ismail dkk. 2012. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. Aceh. Majelis Adat Aceh.
- Jimly Ashididqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta. Raja Grafindo Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Rajawali.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- John M. Echols. 1997. *Dictionary of Law*. Jakarta. Gramedia.
- Made Nurmawati, I Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2017. *Buku Saku Kuliah: Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Peundangan-undangan*. Fakultas hukum. Universitas Udayana.
- Mahmud Yunus. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta. Hidakarya Agung.

- Majelis Adat Aceh dan UNDP. 2008. Pedoman Peradilan Adat di Aceh. Banda Aceh. Majelis Adat Aceh.
- Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta. Kanisius.
- Maria Farida. 2008. Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta. Gramedia.
- Misri A. Muchsin. 2011. Jeumala. Aceh. Majelis Adat Aceh.
- Mohammad Said. 1981. Aceh Sepanjang Abad. Medan. Percetakan dan Penerbitan Waspada.
- Nur Basuki Winanrno. 2008. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta. laksbang mediatama.
- Otje Salman dan Anton F.Susanto. 2005. Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung. Refika Aditama.
- Philippus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya. Bunga Ilmu.
- Poerwadarminto. 1989. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1999. Jakarta. Balai Pustaka.
- Sabian Usman. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta. Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 1976. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Yudi Latif. 2015. Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas dan Aktualitas dari Pancasila. Jakarta. Gramedia pustaka Utama.

Zainuddin Ali. 2009. Metodologi Penelitian hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

2. Jurnal/Artikel Ilmiah:

A.Hamid S. Attamimi. 1985. Materi Muatan perundang-undangan. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 15.

Akbar Hidayatullah, Sufyan. 2022. Kewenangan Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Pembentukan Qanun Kampung (Suatu Penelitian di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang). Banda Aceh. JIM Bidang Hukum Kenegaraan. Universitas Syiah Kuala. Vol. 6.

Bambang Antariksa. 2017. Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun. Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 05. No. 01.

Bohari Muslim. 2018. “Peranan Rayat Genab Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung di Kampung Jerata Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah”. Resam Jurnal Hukum Volume 4. Aceh Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah.

Delfi, Suganda. 2018. Fungsi Strategis Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, Al-Idarah. Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Vol. 2. No. 1.

Dwi Andika. 2020. Peran Rayat Genap Mupakat Dalam Pembentukan Qanun kampung Studi Kasus kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi. Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hafid Wananda. 2022. Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong Di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Skripsi. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Muhammad Miftakhul Huda. Suwandi dan Aunur Rofiq. 2022. implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 11, No. 1.

Musdalizar. 2021. Pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Peraturan Bupati Aceh Selatan

Nomor 77 Tahun 2017. Skripsi. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Oksep Adhayanto. 2011. Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Vol 1 No 1.

Sri Maulizar. 2015. Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014. Jurnal Politeria. Vol.7. No.2.

Sulaiman. 2011. Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Vol 10. No 12.

Yokotani. 2017. Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina). Jurnal, Hukum Progresif, Vol. XI No. 1.

Yulia, dkk. 2021. Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Sawang. Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat. Vol. 5 No. 1.

3. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.